



INTEREST

MAJALAH ILMIAH FE - UNIB

VOLUME XII

NOMOR 01

EDISI JANUARI-JUNI 2009

- BAIHAQI
ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
- SEPRIANTI
EKA PUTRI
KARAKTERISTIK DEMOGRAFI KONSUMEN JASA PENERBANGAN DOMESTIK DI ERA MULTI OPERATOR KOTA BENGKULU
- ROOSE MARINA
A. RAMBE
PERBEDAAN MOTIVASI EKSTRINSIK ANTARA PNS DENGAN PEGAWAI BUMN
- MUHARTINI SALIM
PENGARUH *Process, Employee, Parochial, Open System, Loose Control, dan Normative* TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK BENGKULU CABANG UTAMA
- MERRI ANITASARI
ROMAULINA S
PENERIMAAN PAJAK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DI KOTA BENGKULU: ANALISIS KAUSALITAS
- BIE. INDRASWANTI
KEBUTUHAN MINIMUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DI PROVINSI BENGKULU
- YENNY INDRIANI
NORMAN BENI
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI DAN LAJU INFLASI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI BENGKULU (SUATU STUDY PERIODE 1993 - 2007)
- ARIS ALMAHMUDI
YURNA AMELIA
ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI PROPINSI BENGKULU

Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu
Jalan Raya Kandang Limun Telpon. (07 36) 21396 Bengkulu



- BAlHAQI** ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
- SEPRIANTI EKA PUTRI** KARAKTERISTIK DEMOGRAFI KONSUMEN JASA PENERBANGAN DOMESTIK DI ERA MULTI OPERATOR KOTA BENGKULU
- ROOSE MARINA RAMBE** A. PERBEDAAN MOTIVASI EKSTRINSIK ANTARA PNS DENGAN PEGAWAI BUMN
- MUHARTINI SALIM** PENGARUH *Process, Employee, Parochial, Open System, Loose Control, dan Normative* TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK BENGKULU CABANG UTAMA
- MERRI ANITASARI ROMAULINA S** PENERIMAAN PAJAK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DI KOTA BENGKULU: ANALISIS KAUSALITAS
- BIE. INDRASWANTI** KEBUTUHAN MINIMUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DI PROVINSI BENGKULU
- YENNY INDRIANI NORMAN BENI** PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI DAN LAJU INFLASI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI BENGKULU (SUATU STUDY PERIODE 1993 - 2007)
- ARIS ALMAHMUDI YURNA AMELIA** ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI PROPINSI BENGKULU

**PENGELOLA/PENGURUS PENERBITAN JURNAL EKONOMI
FE-UNIB**

SK.Ddekan
Nomor: 1349.A/J.30.1.12/HK/2004

Penasehat
Dekan Fakultas Ekonomi

Penanggung Jawab
Pembantu Dekan I

Ketua Dewan Penyunting
Retno Agustina Ekaputri

Sekretaris
Sunoto

Editors

Ridwan Nurazi
Universitas Bengkulu

Fery Tema Atmajaya
Universitas Bengkulu

Zulkifli Husen
Universitas Syaib Kuala

Agus Suman
Universitas Brawijaya

Diah Natalisa
Universitas Srinwijaya
Achyar Adnan
Universitas Islam Indonesia

Rachman Lubis
Universitas Syah Kuala
Lizar Alfansi
Universitas Bengkulu

Staf Sekretariatan
Amaliah

Kantor Editor
Majalah Ilmiah INTEREST
Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu
Jl. Raya Kandang Limun Bengkulu
Telp. (0736)21170 Pes (202) Fax. 0376-21396
E-mial : fe_unib03@yahoo.com

MAJALAH ILMIAH INTEREST
Vol. XII No.01 JANUARI-JUNI 2009**ISSN :1410-8828**

Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran Baihaqi	1-18
Karakteristik Demografi Konsumen Jasa Penerbangan Domestik Di Era Multi Operator Kota Bengkulu Prillia Seprianti Eka Putri	19-39
Perbedaan Motivasi Ekstrinsik Antara PNS Dengan Pegawai BUMN Roose Marina a. Rambe	40-48
Pengaruh <i>Process, Employee, Parochial, Open System, Loose Control, dan Normative</i> Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Bank Bengkulu Cabang Utama Muhartini Salim	49-57
Penerimaan Pajak Dan Pengeluaran Pemerintah Di Kota Bengkulu : Analisis Kausalitas Merri Anitasari Roumalina S	58- 63
Kebutuhan Minimum Dan Kesejahteraan Pegawai Di Provinsi Bengkulu Bie. Indraswanti	64-72
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Dan Laju Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Bengkulu (Suatu Study Periode 1993 - 2007) Yenny Indriani Norman Beni.....	73-89
Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sub Sektor Perkebunan Di Propinsi Bengkulu Aris Almahmudi Yurna Amelia	90-94

**Kebutuhan Minimum dan Kesejahteraan Pegawai Di Provinsi Bengkulu
BIE. Indraswanti**

ABSTRACT

The purpose of this study is to know the minimum spending for basic need of PNS family and to know their perception on PNS's welfare. Based on primary data with purposive random sampling, this study used descriptive analysis. In Bengkulu Province, the average minimum spending of the aparatur family is Rp 4.139.570,- with 3-4 person in a family. To offset this expenditure they looking for the others income. The most PNS want 5 workdays a week, because they will the other days for non economic activities. Naturally, their perception is less welfare so they hope the local government add welfare insentives (for education, medicare, etc)

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Pembangunan seyogyanya memperluas akses publik untuk memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan, mempermudah akses publik untuk menikmati berbagai fasilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air bersih, listrik, dll), serta menjamin ketersediaan dan kontinuitas sumber-sumber daya tersebut bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan nasional. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan kesejahteraan sosial. (DepKeu, 2009)

Upaya mendorong pembangunan di Provinsi Bengkulu untuk mencapai visi dan misi Provinsi Bengkulu adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Provinsi Bengkulu dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen

masyarakat Provinsi Bengkulu akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Bengkulu untuk menjadi Provinsi yang unggul di bidang pertanian dan pariwisata. Tingkat keberhasilan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam RPJP, RPJM maupun dalam RKPD tahunan tidak akan terlepas dari peran birokrasi pemerintahan dalam memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program pembangunan tersebut. Lahirnya birokrasi pemerintahan, semenjak awal pada hakekatnya dimaksudkan untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat, membebaskan penduduk dari rasa takut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

2. PERMASALAHAN

Untuk merealisasikan fungsi kesejahteraan dan fungsi pelayanan, maka birokrasi pemerintahan harus menjalankan “kebijakan-kebijakan negara”. Untuk itu, pemerintah dilengkapi dengan berbagai instrumen maupun sarana yang diharapkan mampu memacu kinerjanya secara optimal. Oleh karena mengemban dua fungsi pokok ini, maka salah satu sisi normatif yang melekat pada setiap tindakan atau keputusan pejabat publik (sebagai unsur pelaksana birokrasi) adalah bahwa tindakan atau keputusan tadi haruslah selalu bermuara kepada upaya mencapai kesejahteraan publik.

Meskipun demikian, dalam praktek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dapat diamati bahwa pemerintah menghadapi berbagai kendala maupun hambatan yang menyebabkan pelaksanaan fungsi pelayanan dan kesejahteraan menjadi tersendat. Dengan kata lain, banyaknya tingkat keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik serta masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat, menunjukkan bahwa proses pencapaian tujuan nasional masih akan memakan waktu yang amat panjang, jika tidak dikatakan sebagai suatu kegagalan negara (*state failure*).

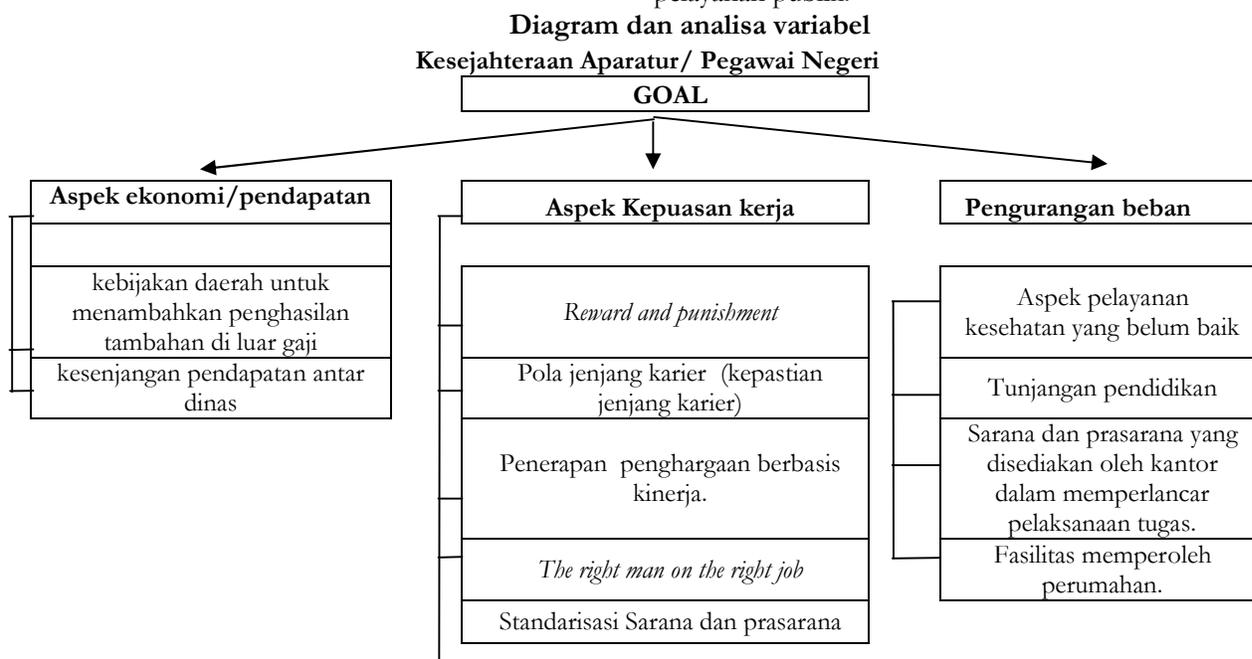
Kesejahteraan pegawai yang relatif masih rendah seringkali dianggap sebagai biang rendahnya kinerja layanan publik. Oleh karena itu memahami kebutuhan dasar pegawai/aparatur menjadi suatu keharusan untuk pengambilan kebijakan.

3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kebutuhan minimum yang dikeluarkan pegawai di Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui persepsi pegawai terhadap kesejahteraan pegawai di Provinsi Bengkulu.

4. KERANGKA TEORITIK

Dalam menjalankan fungsi kesejahteraan dan pelayanan, birokrasi dilengkapi dengan berbagai instrumen maupun sarana yang diharapkan mampu memacu kinerjanya secara optimal. Salah satu instrumen yang paling penting adalah tersusunnya birokrasi ke dalam struktur pemerintahan yang mampu menjangkau hingga lapisan terbawah dari masyarakat serta didukung oleh sumber daya manusia yang semakin baik kualitasnya. Ini jelas dimaksudkan agar masyarakat dapat berhubungan secara langsung dengan aparatur dalam rangka pengurusan maupun pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Di samping itu, birokrasi juga memiliki kebebasan penuh untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka mengatur kepentingan masyarakat tersebut (*freies ermessen*). Bahkan pemerintah berhak pula untuk memaksa dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mentaati setiap peraturan yang telah diundangkan (*law enforcement*). Tidak dapat dikesampingkan pula adalah tersedianya anggaran yang cukup besar untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah, sekaligus sebagai sumber pengeluaran rutin untuk membayar gaji aparatur. Satu aspek lagi yang sering dikesampingkan adalah tersedianya logistik (kendaraan, persediaan barang, cadangan bahan makanan dan sebagainya) yang memadai untuk menunjang pelayanan publik.



yang tersedia di antara dinas pada
berbagai jenjang eselon.

Sumber: Balitbang, 2008

5. Metode Kajian

Metode pengambilan sampel dalam kajian ini adalah menggunakan tehnik *purposive random sampling*. Data primer diperoleh dari aparatur berbagai golongan yang bekerja di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten / Kota induk yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Rejang Lebong. Namun demikian, ada beberapa responden dari daerah pemekaran yang dipilih sebagai pembanding. Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif kuantitatif dan kualitatif, di mana data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisa tabel.

6. Rasio Pelayanan Aparatur

Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2007 diperkirakan mencapai 1.616.663 juta jiwa. Ditinjau dari jumlahnya, perkembangan penduduk Provinsi Bengkulu tergolong cepat. Dalam kurun waktu 1980-2006 atau dalam waktu 25 tahun penduduk Provinsi Bengkulu telah berkembang lebih dari 2 (dua) kali lipat, yaitu dari 0,77 juta tahun 1980 menjadi 1,61 juta tahun 2007. Pesatnya perkembangan jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada kurun waktu 1980-2006 secara nyata terlihat dari angka pertumbuhan penduduknya (BPS, 2007).

Dilihat dari angka rasio pelayanan aparatur terhadap penduduk, maka rata-rata rasionya adalah melebihi angka rasio ideal yakni 1: 103. Pada tahun 2007 rasio pelayanan secara keseluruhan adalah 1: 75 untuk Provinsi Bengkulu. Sedangkan rasio untuk kabupaten dan kota induk adalah sebagai berikut (BAPPENAS- UNIB, 2008):

- | | |
|---------------------|-------|
| 1. Bengkulu Selatan | 1: 30 |
| 2. Rejang Lebong | 1: 46 |
| 3. Bengkulu Utara | 1: 55 |
| 4. Kota Bengkulu | 1: 50 |

Dengan adanya pemekaran, daerah masih memerlukan aparatur yang sesuai dengan

kebutuhan daerah baru, sehingga rasio PNS sangat baik. Dengan rasio yang sangat ideal, seharusnya aparatur mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namun tetap saja masih terdapat beberapa keluhan masyarakat terhadap pelayanan aparatur.

7. Kebutuhan Minimum dan Kesejahteraan Penduduk

Ukuran kesejahteraan yang biasa digunakan dalam teori ekonomi adalah pendapatan perkapita. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, semakin sejahtera penduduknya dibandingkan daerah lain. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tingkat harga yang berlaku (tingkat inflasi) di daerah yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan kesejahteraan. Oleh karena itu, perlu memahami kebutuhan minimum penduduk suatu daerah.

Pegawai negeri sipil (PNS) sebagai bagian dari masyarakat suatu daerah memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan penduduk. Melalui perannya sebagai abdi masyarakat, PNS atau sering disebut sebagai aparatur, memberikan jasa pelayanan publik yang dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Sebagai abdi masyarakat, aparatur dituntut memberikan pelayanan terbaiknya. Untuk dapat melayani secara maksimal, aparatur harus sudah dalam kondisi sejahtera. Kesejahteraan aparatur senantiasa menjadi perhatian pemerintah dari waktu ke waktu. Namun demikian tidak mudah mengukur kesejahteraan. Secara umum, kesejahteraan dapat diukur dari tiga aspek: ekonomi/pendapatan, pengurangan beban, dan kepuasan kerja.

7.1. Pola Pendapatan Aparatur

Aspek ekonomi dilihat dari pendapatan merupakan sisi penting untuk mencukupi kebutuhan aparatur dan keluarganya. Seberapa besar pendapatan utamanya yang berasal dari gaji sebagai pegawai negeri mampu menutupi kebutuhan dapat dilihat dari pola pengeluarannya, serta usahanya untuk

memperoleh pendapatan di luar gaji. Dengan standar gaji PNS sama di semua wilayah Indonesia, namun dengan kebutuhan yang berbeda, membuat aparatur berusaha untuk memperoleh pendapatan lain.

Dengan menggunakan 65 responden berbagai golongan PNS sebagai sampel, 66,15% di antaranya memiliki pendapatan lain selain gaji. Dari 22 aparatur (33,85%) yang hanya mengandalkan gaji, 17 orang di antaranya memang belum memiliki anak (26,2%).

Tabel 1. Pendapatan Rata-rata Per Bulan Aparatur Menurut Golongan

PENDAPATAN	3A	3B	3C	3D	4A	2B
GAJI (Rp)	1.788.441	3.112.500	2.069.000	2.698.787	3.713.800	1.530.000
(%)	(56,04)	(75,68)	(59,32)	(54,64)	(74,97)	(71,83)
LAIN-LAIN (Rp)	1.403.125	1.000.000	1.187.500	1.866.667	1240000	600.000
(%)	(43,96)	(24,32)	(34,05)	(37,80)	(25,03)	(28,17)
TOTAL (Rp)	3.191.566	4.112.500	3.487.750	4.938.787	4.953.800	2.130.000
(%)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

Sumber: data primer diolah, 2009

Tabel 1. menunjukkan bahwa semua aparatur mempunyai pendapatan lain selain gaji. Kondisi ini menegaskan bahwa standar gaji yang ada masih jauh dari mencukupi kebutuhan aparatur dan keluarganya. Pendapatan lainnya bagi PNS memiliki peran yang sangat penting. Hal ini ditunjukkan oleh relatif tingginya bagian ini dalam pendapatan, dari yang terendah 24,32% hingga yang tertinggi 43,96%.

Dengan rata-rata pendapatan PNS per bulan sebesar Rp 3.802.400,50, ternyata memang kebanyakan aparatur (23 orang) masih

menempatkan gaji sebagai porsi terbesar dari pendapatannya (antara 90 – 100%). Yang istimewa adalah 8 aparatur dari golongan 3 memiliki pendapatan di luar gaji lebih dari 60% (tabel 2). Tuntutan kebutuhan dan atau karena peluang yang ada memungkinkan hal tersebut dapat terjadi. Hanya saja jika usaha memperoleh pendapatan di luar gaji menyebabkan kinerja pelayanan menurun, tentu saja tidak dapat dibiarkan terjadi terus. Oleh karena itu, memahami kebutuhan sebagai basis penentuan kesejahteraan aparatur dan keluarganya menjadi hal yang sangat penting.

Tabel 2. JUMLAH RESPONDEN MENURUT GOLONGAN DAN PERSENTASE GAJI DARI PENDAPATAN (orang)

% Gaji dari Pendapatan	3a	3b	3c	3d	4a	2b	TOTAL
90 - 100	11	2	6	3	1	0	23
65 - 85	8	4	2	1	3	1	19
40 - 64	10	1	3	0	1	0	15
< 40	3	1	4	0	0	0	8
Jumlah	32	8	15	4	5	1	65

Sumber: data primer diolah, 2009

Kesejahteraan aparatur yang dilihat dari pendapatan per kapita menunjukkan bahwa PNS golongan 3A yang memiliki pendapatan per kapita paling tinggi. Hal ini karena banyak responden dari golongan ini yang belum memiliki anak, padahal mereka juga memiliki

pendapatan lain selain gaji. Sementara justru pendapatan per kapita yang terendah adalah PNS golongan 3D. Jumlah anak terbanyak memang dari golongan ini (lihat tabel 4.)

Tabel 3. Pendapatan Per Kapita Aparatur Menurut Golongan

Golongan	Pendapatan rata-rata (Rp)
3A	1.846.182
3B	1.112.000
3C	1.249.751
3D	917.500
4A	1.300.600
2B	1.065.000
Rata-rata Pendapatan per kapita	1.248.506

Sumber: data primer diolah, 2009

7.2. Tanggungan Keluarga

Kebutuhan aparatur per bulan tidak dapat dilepaskan dari jumlah tanggungannya. Semakin banyak anak, semakin besar

kebutuhannya, sehingga pengeluarannya akan semakin besar pula. Dari responden yang ada, dengan variasi tanggungan, utamanya dilihat dari jumlah anak, bervariasi pula pengeluarannya (tabel 4. dan tabel 5)

Tabel 4. Jumlah Anak yang ditanggung Aparatur Menurut Golongan (orang)

Jumlah Anak	3A	3B	3C	3D	4A	2B	Total
Belum punya (0)	15	1	0	0	0	1	17
Satu (1)	9	2	3	0	2	0	16
Dua (2)	7	5	8	2	1	0	23
Tiga (3)	1	0	2	2	1	0	6
Empat (4)	0	0	1	0	1	0	2
Lima (5)	0	0	1	0	0	0	1
Total	32	8	15	4	5	1	65

Sumber: data primer, Juli 2009

7.3. Pengeluaran Aparatur Menurut Golongan

Pengeluaran aparatur per bulan mengindikasikan kebutuhan keluarganya. Dengan mengelompokkan berbagai pengeluaran ke dalam 5 kelompok, dapat diketahui pola pengeluarannya. Pola tersebut menunjukkan peran masing-masing

pengeluaran dalam keluarga aparatur. Semakin besar porsi pengeluaran untuk kelompok tertentu, semakin penting artinya, dan ini juga mengindikasikan keadaan ekonominya. Perbedaan pola pengeluaran aparatur di antara berbagai golongan menunjukkan perbedaan posisi/bobot pengeluaran tersebut.

Tabel 5. Pengeluaran Rata-rata Per Bulan Aparatur Menurut Golongan

PENGELUARAN	3A	3B	3C	3D	4A	2B	(%)
KONSUMSI (Rp) (%)	923.438 (27,65)	1.602.500 (44,72)	1.906.667 (37,19)	2.250.000 (40,63)	1.800.000 (37,74)	1.500.000 (60,48)	40,19
KESEHATAN (Rp) (%)	260.938 (7,81)	312.500 (8,72)	413.333 (8,06)	600.000 (10,84)	450.000 (9,43)	200.000 (8,06)	9,01
PENDIDIKAN (Rp) (%)	998.437 (29,89)	555.625 (15,51)	1.320.000 (25,75)	812.500 (14,67)	1.400.000 (29,35)	0 (0)	20,48
TRANSPOR (Rp) (%)	542.187 (16,23)	556.250 (15,52)	840.000 (16,38)	1.125.000 (20,32)	820.000 (17,19)	180.000 (7,26)	16,36
LAIN-LAIN (Rp) (%)	615.125 (18,42)	556.250 (15,52)	646.667 (12,61)	750.000 (13,54)	300.000 (6,29)	600.000 (24,19)	13,96
PENGELUARAN (Rp) (%)	3.340.125 (100)	3.583.125 (100)	5126.667 (100)	5.537.500 (100)	4.770.000 (100)	2.480.000 (100)	100

Sumber: data primer, 2009

Secara umum, aparatur memiliki pola pengeluaran yang didominasi untuk konsumsi (40,19%), diikuti pos pendidikan, transportasi, pengeluaran lain dan yang terkecil pos untuk kesehatan (9,01%). Dengan pengeluaran aparatur rata-rata per bulan sebesar Rp 4.139.569,- pola pengeluaran seperti ini dapat dikatakan relatif baik, karena alokasi yang proporsional. Namun, memang besarnya pengeluaran per bulan dapat dikatakan bahwa biaya hidup di Bengkulu relatif tinggi, dengan tanggungan keluarga berkisar antara 4-5 orang dalam keluarga aparatur.

8. Kesejahteraan Aparatur

Dengan standarisasi gaji PNS di satu sisi, dan kebutuhan di sisi lain menyebabkan

kesejahteraan PNS dan keluarganya berbeda. Untuk mencukupi kebutuhan, kebanyakan PNS memiliki usaha/kerja lain yang digunakan sebagai tambahan pendapatan. Namun demikian, sekalipun sudah memiliki pendapatan lain selain gaji, tetap saja secara rata-rata masih terdapat kondisi defisit di hampir semua golongan, kecuali golongan 4A (tabel 6). Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang ada belum mampu mencukupi kebutuhan aparatur dan keluarganya. Sekalipun pada umumnya keluarga akan berusaha menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatannya, namun dengan kebutuhan minimum tidak mudah bagi aparatur untuk mengurangi pengeluaran bahkan untuk pos-pos tertentu.

Tabel 6. Kondisi Keuangan Aparatur Per Bulan Menurut Golongan (Rupiah)

Golongan	Pendapatan	Pengeluaran	Selisih
3A	3.191.565	3.340.125	-148.560
3B	3.487.750	3.583.125	-95.375
3C	4.938.787	5.126.667	-187.880
3D	4.112.500	5.537.500	-1.425.000
4A	4.953.800	4.770.000	183.800
2B	2.130.000	2.480.000	-350.000
rata-rata	3.802.400	4.139.569	-337.169

Sumber: hasil penelitian, Juli 2009

Dari tabel 6 tersebut dapat dikatakan bahwa pada sebagian besar keluarga aparatur di Provinsi Bengkulu masih belum menunjukkan

kesejahteraan yang berarti. Besarnya pengeluaran keluarga aparatur tidak dapat dipisahkan dari besarnya tanggungan dan

harga barang yang harus dibayarkan (biaya hidup yang tidak sama di berbagai daerah karena tingkat inflasi yang berbeda). Dapat dikatakan bahwa banyak keluarga aparatur yang lebih besar pasak daripada tiang, sehingga kemungkinan besar yang terjadi adalah budaya utang yang bisa menjerat hidup dengan sistem gali lobang tutup lobang yang tidak tertutupi.

Kondisi seperti tidak dapat dibiarkan terus menerus terjadi. Ada berbagai kemungkinan dampak yang dapat terjadi. Kalau tidak terjerat utang berkepanjangan yang dapat menimbulkan perbuatan tercela, juga kemungkinan usaha sampingan yang diusahakan namun kemudian pekerjaan utama pelayanan kepada masyarakat yang dikorbankan, sehingga tidak optimal.

9. Persepsi Aparatur Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan

Penilaian kinerja seluruh pemangku kepentingan (pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan swasta) dicerminkan oleh enam indikator kualitatif dan kuantitatif. Enam indikator tersebut mencakup: IPM (indeks pembangunan manusia), intensitas kemiskinan, indeks persepsi korupsi, GCG (*good corporate governance*), laporan keuangan serta indeks tata kelola ekonomi daerah. Berdasarkan penjumlahan (komposit) 6 indikator dengan bobot tertimbang masing-masing indikator, telah menempatkan Provinsi Bengkulu pada urutan ke-20 dengan skor 40,33. Dengan skor di bawah 50, diasumsikan bahwa ada ketimpangan distribusi dan alokasi sumber daya (modal, keahlian, infrastuktur) langsung tercermin pada taraf hidup masyarakat dan kinerja pemerintahan. (Depdagri, 2009)

Tentu tidak semua hasil evaluasi instansi dimasukkan dalam unsur penilaian. Fokusnya adalah pada eksistensi dan hakikat relasi pemerintah daerah dan masyarakat (juga swasta). Hal ini diartikan bahwa lebih bersentuhan pada misi terpenting otonomi daerah, yaitu: kesejahteraan, pelayanan, keadilan, partisipasi, dan transparansi. (Depdagri, 2009).

9.1. Lingkungan Kerja

Salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan aparatur adalah lingkungan yang mendukung karir. Pola penentuan jenjang yang baik membuat aparatur merasa puas. Kepuasan ini memberi rasa nyaman sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat optimal. Berdasarkan kajian di lapangan, dari kondisi di lingkungan pemerintahan di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa sebagian besar (70,77%) aparatur dari berbagai golongan menyatakan tidak puas dengan sistem penentuan jenjang karir karena belum/tidak adanya sistem penjenjangan karir.

Ketidakpuasan aparatur pada sistem penjenjangan karir utamanya karena masih kuatnya unsur KKN (30,44%). Hal ini sejalan dengan penilaian media otonomi, bahwa Bengkulu memiliki indeks persepsi korupsi 4,46 yang menempati urutan ke 16 dari 30 Provinsi yang dinilai.

Dalam jajaran pemerintahan, dikenal istilah BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing, yang diketuai oleh sekretaris daerah. Legitimasinya diatur melalui keputusan kepala daerah. Keputusan yang ditandatangani kepala daerah langsung memiliki legalitas **sebagai putusan jabatan, dan bukan lagi sebagai keputusan pejabat**. Dengan demikian berarti, kepala daerah pun harus tunduk dengan putusan jabatan itu, sekalipun ia sendiri menandatangani keputusan itu. Hal ini menunjukkan bahwa status putusan jabatan lebih tinggi nilainya dan harus dihormati (Hasan, 2009).

Jika BAPERJAKAT tidak difungsikan, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan pejabat mengalahkan putusan jabatan. Kondisi seperti ini menyebabkan ketidakpuasan PNS akan kepastian karirnya, dan hal tersebut dapat berdampak pada kinerja yang kurang baik. Media otonomi menegaskan persepsi aparatur bahwa tata kelola ekonomi daerah untuk Bengkulu menempati urutan ke 23, juga untuk rating GCG.

Sebagaimana dalam analisis kebutuhan formasi jabatan PNS, pimpinan suatu

organisasi (pemerintahan) perlu mempertimbangkan beban kerja. Perhitungan beban kerja didasarkan pada kegiatan yang secara sungguh-sungguh dilaksanakan oleh pegawai dalam jabatan tertentu, sekalipun hanya beberapa menit saja. Pertimbangan utama dalam pelaksanaan pekerjaan (penetapan beban kerja) adalah produktivitas yang dicapai secara efisien dan efektif.

Menurut Herzberg (dalam Atmosoeparto, 2001:34), yaitu teori Higiene menyatakan bahwa dengan mengembangkan motivasi tugas-tugas yang semakin berat tidak akan dirasakan sebagai beban, bahkan Performance yang dihasilkan akan selalu memenuhi harapan dan semakin meningkat, bila orang memberikan respon pada harapan yang tinggi dari atasannya dengan kinerja (Performance) yang tinggi dan semakin tinggi. Fenomena ini disebut sebagai Effective Cycle.

Pencapaian hasil secara efisien dan efektif perlu diperhatikan di semua lini. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Di antara upaya tersebut adalah penentuan hari kerja dalam melayani masyarakat. Variasi dalam menentukan hari kerja tergantung kebutuhan/kepentingan masing-masing daerah. Ada daerah yang memilih 5 hari kerja dan ada yang memilih 6 hari kerja. Apapun pilihannya, tujuan penting yang diajukan adalah efisiensi dan efektivitas.

Namun demikian, aparatur juga berhak memberikan pendapat yang menurut mereka paling sesuai.

Dari kajian yang telah dilakukan, 80% aparatur berbagai golongan di Provinsi Bengkulu menginginkan 5 hari kerja/HK. Keinginan untuk bekerja pada 5 HK diajukan dengan berbagai alasan. Alasan yang terbanyak adalah lebih efektif dan efisien (27,42%), apalagi didukung alasan bahwa hari Sabtu ternyata banyak juga PNS yang tidak masuk kantor dengan berbagai alasan. Selain itu, ternyata kebutuhan bersama keluarga dan untuk refreshing juga menempati porsi yang besar. Kalau dua alasan ini digabung, maka porsi kebutuhan individu dan keluarga (kebersamaan) merupakan alasan terbesar, apalagi ditambah kebutuhan bermasyarakat.

Hal ini dapat dikatakan bahwa kesejahteraan juga menyangkut bagaimana aparatur dapat menikmati hidup. Justru alasan cari kerja sampingan ternyata menempati urutan keempat.

9.2. Kesejahteraan Aparatur

Pandangan paling umum untuk mengukur kesejahteraan adalah pendapatan per kapita. Namun demikian, dengan pendapatan per kapita relatif sama, kesejahteraan yang dirasakan pada daerah yang berbeda juga berbeda. Kondisi seperti dapat dimaklumi karena biaya hidup antar daerah juga berbeda (inflasi di Bengkulu tahun 2008 sebesar 7,92% (yoy), lebih tinggi dari tingkat nasional (Bank Indonesia, 2009). Oleh karena itu, persepsi aparatur terhadap pendapatan yang diterimanya juga dapat berbeda-beda. Dari 65 responden aparatur di Bengkulu, ternyata 93,8% dari berbagai golongan menganggap pendapatan mereka belum cukup.

Sejalan dengan laporan kinerja pemerintah Provinsi-Provinsi di Indonesia untuk periode tahun 2004 -2008 yang ditinjau dari indikator intensitas kemiskinan, Provinsi Bengkulu menempati ranking 23 dengan skor 5,33 dan dengan derajat kemiskinan 21,99%. Dari derajat kemiskinan terendah sebesar 4,27% (DKI Jakarta) dan derajat kemiskinan tertinggi 40,05% (Papua), menunjukkan bahwa masyarakat di Provinsi Bengkulu masih berada dalam kategori miskin. Dengan aparatur sebagai salah satu penggerak pembangunan ekonomi, memerlukan perhatian pemerintah untuk lebih dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Dengan pandangan bahwa pendapatan yang diterima belum mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, para aparatur memberikan berbagai pendapat yang ditujukan pada pemerintah. Secara garis besar pendapat tersebut dikelompokkan menjadi tiga: usulan pemberian tunjangan khusus, menaikkan gaji, serta lain-lain.

9.3. Pengurangan Beban

Kesejahteraan menjadi sesuatu yang senantiasa dijadikan dasar pertimbangan pengambilan kebijakan ketenagakerjaan. Selain

peningkatan pendapatan, pengurangan beban juga menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Selama ini, pemerintah telah memiliki kebijakan untuk mengurangi beban pegawai, seperti memberikan fasilitas untuk kelancaran tugas, kemudahan mendapat perumahan, serta ASKES. Namun demikian, beban pemerintah yang relatif besar, semua hal tersebut masih belum sepenuhnya berjalan baik.

Selain sebagai upaya meningkatkan pendapatan, keinginan aparatur untuk mendapatkan tunjangan khusus juga ditujukan untuk mengurangi beban. Dari 35 responden yang menginginkan adanya tunjangan khusus, sebagian besar menginginkan adanya tunjangan pendidikan, transportasi dan bahkan tunjangan kesehatan yang lebih baik. Tunjangan khusus ini diharapkan dapat diberikan oleh pemerintah daerahnya sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran utama keluarga aparatur.

KESIMPULAN

Sebagai abdi masyarakat, aparatur (PNS) dituntut memberikan pelayanan terbaik. Kinerja yang baik dapat dihasilkan dari berbagai faktor yang membuat aparatur dapat bekerja baik. Dengan gaji standar PNS yang ada, serta biaya hidup yang relatif tinggi, membuat aparatur mencari tambahan penghasilan lain demi mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya. Tingginya pengeluaran per bulan karena tanggungan anak yang besar menunjukkan bahwa beban aparatur tinggi. Beban yang tinggi membuat PNS mencari penghasilan di luar gaji. Penghasilan dari selain gaji ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang rendah jika semata-mata mengandalkan gaji. Namun demikian kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari pendapatan saja karena kebanyakan PNS menginginkan lima hari kerja agar dapat mempergunakan hari libur lainnya untuk aktivitas non ekonomi. Dengan kesejahteraan yang menurut persepsi PNS masih rendah tentu membuat kinerja aparatur dalam menjalankan fungsi pelayanan publik menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah masih perlu

Prilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS tanpa harus mengorbankan kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, 2009. *Perkembangan Perekonomian Perekonomian Daerah Provinsi Bengkulu*. Triwulan II - 2009
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional – Universitas Bengkulu, 2008. *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu*. Tidak dipublikasikan
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu. 2008. *Profil Aparatur Provinsi Bengkulu*.
- BPS Provinsi Bengkulu, 2007. *Bengkulu Dalam Angka*.
- Departemen Dalam Negeri RI, 2009. *Mediaotonomi*. Ranking Provinsi 2004-2008. Edisi No. 01 th. IV 2009.
- Departemen Keuangan RI, 2009. *Media Keuangan*. Vol. IV. No. 22/Juni/2009
- Hasan, April, 2009. *Pengangkatan & Penempatan PNS*. ALTI Palembang
- Biro Kepegawaian Provinsi Bengkulu, 2009. *Profil Aparatur Provinsi Bengkulu*.

